



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Percuma Tanpa RUU Perampasan Aset
Tanggal	: Kamis, 09 November 2023
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 3

Percuma Tanpa RUU Perampasan Aset

Keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF), akan percuma jika RUU Perampasan Aset tak kunjung menjadi Undang-undang. Pemerintah akan gunakan instrumen hukum yang ada seperti PPATK.

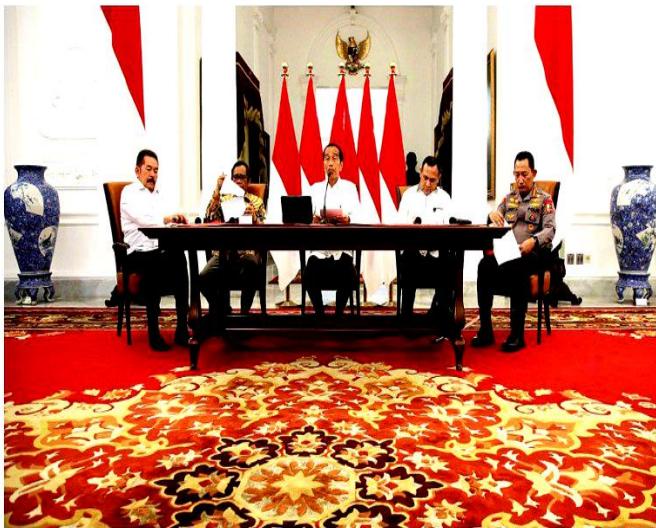
JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan menyempurnakan infrastruktur hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Keanggotaan penuh ke-40 Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) di Paris, Perancis, akan percuma jika RUU Perampasan Aset yang dikirimkan ke DPR sejak Mei lalu, tak kunjung dibahas dan disetujuijadi undang-undang.

Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter Rabu (8/11/2023), menyatakan, saat Indonesia sudah menjadi anggota penuh FATF, konsekuensinya, pencegahan dan pembentangan TPPU harus semakin masif dan efektif. Sebab, hal itu akan dirilis oleh FATF.

Namun, jika melihat data ICW, dalam kasus korupsi selama ini, penggunaan pasal TPPU diaku masih sedikit. Penindakan kasus korupsi di EPK pada 2022 misalnya, ada sebanyak 36 kasus. Meski demikian, KPK hanya empat kali menggunakan pasal TPPU. Nilai aset yang dikembalikan dari TPPU itu pun masih sangat minim. Karenanya itu, ia berharap pemerintah segera menegaskan RUU Perampasan Aset.

"Setelah itu, antrean berkutinya baru RUU Kitab Hukum Acara Pidana dan RUU Perampasan Aset," kata Taufik. Politikus Partai Nasdem itu memperkirakan, Komisi III akan mengajukan penyelesaian draf RUU yang sedang dalam proses pembahasan sebelum membahas usulan RUU baru. Ia menambah bahwa progres RUU Perampasan Aset lambat, la menilai belum ditugaskannya Komisi III membahas RUU Perampasan Aset lebih karena masih terdapat antrean RUU yang sedang dibahas.

"RUU Perampasan Aset bisa cepat dibahas dan disahkan jika ada kemauan politik yang kuat dari pembentuk UU. Selama ini muncul anggapan RUU Peramp-



Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, dan Kapolda Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan berbagai hal terkait korupsi, khususnya angloknya Indeks Persepsi Korupsi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Presiden menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Sekilas itu, Presiden juga mendorong dua rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal, segera dibahas.

ini diajukan," kata Taufik.

Sejak 25 Oktober lalu, Indonesia pun tercatat telah menjadi anggota penuh FATF. FATF merupakan organisasi internasional yang berfokus pada upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendaftaran terorisme, dan pendanaan perang melalui senjata pemusnahan massal. Status keanggotaan Indonesia diterima setelah lewat serangkaian pengujian sejak 2021.

Indonesia sudah mengajukan diri sebagai anggota penuh FATF sejak 2018. Pada 2001, Indonesia pernah masuk daftar black list. Tahun 2018 Indonesia kemudian mendafat lagi untuk menjadi anggota pe-

miliki perangkat hukum memerlukan perbaikan terutama di bidang pencucian uang.

Pada tahun 2002, Indonesia kemudian membuat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Undang-undang itu lalu diubah menjadi UC Nomor 25 Tahun 2003, dan yang terbaru Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Setelah terus dimonitor sampai akhirnya pada tahun 2015,

hingga akhirnya masuk menjadi anggota ke-40 FATF.

Instrumen hukum

Menanggapi desakan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kepada pers mengatakan, pemerintah sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Surya Presiden juga sudah dikirim ke DPR. Pihaknya menunggu DPR memprosesnya.

Namun, jika perkembangan RUU Perampasan Aset lambat di DPR, Mahfud menegaskan, pemerintah akan menggunakan instrumen yang ada untuk di-

wa kita sudah semakin maju dan akan tetap akan memerlukan korupsi dan pencucian uang," kata Mahfud.

Indonesia sebagai anggota penuh, jelas Mahfud, berarti diajukan secara global setara dengan negara yang menerapkan rezim antipencucian uang, tindak pidana terorisme, dan antipekerjaan senjata pemusnahan massa dalam kluster besar tindak pidana korupsi. Indonesia dianggap cukup berhasil melakukan perang total terhadap korupsi, pencucian uang, dan terorisme. "Ini satu hal penting bagi perkembangan pemberantasan korupsi, terutama korupsi-korupsi yang berlanjut dengan TPPU atau di dalamnya TPPU," kata Mahfud.

Pemulihan aset

Kepala PPATK Ivan Yustiawandana mengatakan, setelah Indonesia resmi menjadi anggota penuh FATF, ia melaporkan hal itu kepada Presiden Joko Widodo. Ia pun mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi bahwa Indonesia harus menjadi anggota tetap karena satu-satunya negara G-20 yang belum menjadi anggota FATF adalah Indonesia. Harapan Presiden itu juga disampaikan secara verbal kepada tim penilai dari FATF.

Terkait dengan RUU Perampasan Aset, salah satu fokus utama dari pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah pemulihan aset. Aset-aset hasil kejahatan baik di dalam dan luar negeri harus bisa dipulihkan untuk dikembalikan ke kas negara. Perampasan aset memang menjadi salah satu hal yang disorot oleh tim FATF.

Deputi Strategi dan Kerja Sama PPATK Tutu Wahyuningtyas mengatakan, jika RUU Perampasan Aset ini benar-benar disahkan, hal itu akan membantu penilaian Indonesia sebagai anggota FATF dalam aspek tata kelola pemerintahan yang baik. (DEA)